

**STRATEGI PENERAPAN *E-GOVERNMENT* DI DINAS KOMUNIKASI  
INFORMATIKA KABUPATEN MANOKWARI  
PROVINSI PAPUA BARAT**

Anjas Rivan Arto Erto Muid NPP. 32.1099

*Asdaf Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat Program Studi Teknologi  
Rekayasa Informasi Pemerintahan Email: [32.1099@praja.ipdn.ac.id](mailto:32.1099@praja.ipdn.ac.id)  
[rivananjas88@gmail.com](mailto:rivananjas88@gmail.com)*

Pembimbing Skripsi: Drs. H. Sabbaruddin, M.Ag

**ABSTRACT**

**Problem/Background:** *(Contains the background of the research).* The author focuses on the problem of implementation strategies. *e-government* at the Communication and Information Service of Manokwari Regency, West Papua Province. **purpose:** The purpose of this study is to analyze the implemented strategies and evaluate their impact on the community. **Method** This study uses a qualitative research method with a descriptive approach. The data collection techniques used are interviews, documentation and observation. In addition, the researcher uses the SWOT analysis technique by F. Rangkuti. **Results/Research findings** include analysis and interpretation of data obtained through interviews, observations, and documentation. In addition, the research also includes infrastructure and media used to support implementation. *e-government* at the Communication and Informatics Service, Manokwari Regency. The data analyzed came from the period 2024 to 2025, and was used as a basis for explaining the implementation of *e-government* in the Regency Manokwari. **Conclusion:** *Implementation of e-government at the Manokwari Regency Communication and Information Service, West Papua Province, Implementation of e-government in the Communication and Information Service of Manokwari Regency, it is an important effort to increase the efficiency of government and public services, the activities of young people, and the level of*

**Keywords:** *e-government, Gita Papeda, SWOT*

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** (Berisi background yang melatarbelakangi penelitian). Penulis berfokus pada permasalahan strategi penerapan *e-government* di dinas komunikasi informatika kabupaten manokwari provinsi papua barat. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi yang diimplementasikan dan mengevaluasi dampaknya terhadap Masyarakat. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi. Selain itu peneliti menggunakan teknik analisis SWOT oleh F. Rangkuti. **Hasil/ Temuan:** penelitian yang meliputi analisis dan interpretasi terhadap data yang diperoleh melalui wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Selain itu, penelitian juga mencakup infrastruktur serta media yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan *e-government* pada Dinas Komunikasi, Informatika, Kabupaten Manokwari. Data yang dianalisis berasal dari periode tahun 2024 hingga 2025, dan digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan penerapan *e-government* di Kabupaten Manokwari. **Kesimpulan:**

Penerapan *e- government* di Diskominfo Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, Penerapan *e-government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manokwari merupakan upaya penting dalam meningkatkan efisiensi pemerintahan dan pelayanan publik.

**Kata kunci** : *e-government*, Gita Papeda, SWOT

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi di era digital saat ini, penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan, yang dikenal dengan istilah *e-government*, menjadi semakin penting. Hal ini merupakan agenda pembangunan berkelanjutan, menurut (Sunardi et al., 2023) Konsep pembangunan berkelanjutan merujuk pada upaya pemenuhan kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. *E- government* tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik, tetapi juga untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Menurut (Nurrahman & Bagau, 2023) Berbagai upaya harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terus dilakukan, antara lain dengan digitalisasi layanan publik dan pelibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraannya melalui media yang mudah diakses oleh publik. Menurut (Gasparyan, 2024) Meskipun berbagai perangkat tata kelola digital telah diperkenalkan sebagai upaya untuk mengurangi tekanan tersebut, tingkat efektivitasnya masih berbeda-beda tergantung pada konteks penerapan dan kesiapan masing-masing daerah atau lembaga yang menggunakannya. Di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, perkembangan *e-government* menjadi salah satu prioritas dalam upaya modernisasi pelayanan publik. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Barat, tingkat penetrasi internet di Papua Barat mencapai 45% pada tahun 2022, yang menunjukkan potensi besar untuk penerapan *e-government* (BPS Papua Barat, 2022). Penerapan *e-government* di Diskominfo Kabupaten Manokwari diharapkan dapat memberikan akses yang lebih baik bagi Masyarakat terhadap layanan publik. Menurut (Nainggolan & Aqil, 2023) Situs web pemerintah dibentuk sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat akan akses informasi yang akurat, terpercaya, dan resmi. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Sejalan dengan itu (Nangameka & Kusmana, 2022) mengatakan salah satu bentuk inovasi dalam pelayanan publik adalah pengembangan website. Website berperan sebagai sarana utama untuk menilai sejauh mana penerapan *e-Government* di suatu daerah, sekaligus menjadi akses awal bagi masyarakat terhadap berbagai layanan publik tanpa harus bertemu langsung.

Meskipun ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, masih terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi. Misalnya, kurangnya infrastruktur teknologi yang memadai, Rendahnya tingkat literasi digital di kalangan masyarakat, serta resistensi terhadap perubahan dari pegawai pemerintah. Salah satu penyebab utama ketertinggalan pelayanan publik di Kabupaten Manokwari adalah keterbatasan infrastruktur, akses teknologi, dan rendahnya indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Infrastruktur yang tidak memadai, seperti jalan, listrik, dan jaringan internet, menghambat kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan yang optimal.

Di era digital saat ini, kemampuan menggunakan internet untuk mencari informasi menjadi suatu keharusan bagi semua orang. Pemerintah daerah Kabupaten Manokwari Telah menjalankan program kerja untuk menerapkan *E-government*, yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan setempat. Presiden juga telah mengeluarkan kebijakan

yang mewajibkan setiap kota dan kabupaten memiliki program *E-government*. Program ini bertujuan untuk mencegah penyebaran informasi yang tidak akurat di masyarakat secara tepat waktu dan cepat.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan strategi *e-government* oleh Dinas Komunikasi, Informatika, di Kabupaten Manokwari.

## 1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan *e-government* rendahnya pemahaman dan keterampilan sumber daya manusia terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung *e-government*.

Sumber daya manusia (SDM) sebagai faktor utama dalam peningkatan *e-government* di Dalam birokrasi pemerintahan agar tujuan *e-government* dapat berjalan baik dalam sistem pemerintahan.

1. Meningkatkan mutu dan optimalisasi penggunaan teknologi informasi untuk mendukung jalannya pemerintahan. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, serta melibatkan peran aktif pemuda dalam proses dan Tingkat *e-government*
2. Memperbaiki organisasi serta sistem manajemen pemerintahan;
3. Membentuk suatu jaringan komunikasi dan informasi yang tidak terbatas oleh sekat waktu dan lokasi serta biaya yang dapat di jangkau masyarakat;
4. Membentuk jaringan interaktif pemerintah dengan dunia usaha;
5. Membentuk mekanisme komunikasi antara semua lembaga pemerintahan;
6. Membangun sistem manajemen dan alur kerja yang transparan serta efisien untuk mempermudah transaksi dan meningkatkan pelayanan di antara berbagai lembaga pemerintah.
7. Karakteristik *E-Government* dan *Good Government*.

Tujuan tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan *e-government* di kabupaten manokwari. Menurut (Ibadoghlu, 2018) Kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut perlu mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kapasitas sumber daya manusia, peran serta sektor swasta dan sistem komunikasi, serta kondisi lingkungan, iklim, demografi, dan faktor-faktor relevan lainnya di wilayah masing-masing. Tantangan dalam mengintegrasikan sistem *e-government* dengan prosedur yang sudah ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manokwari, untuk mengoptimalkan pelayanan sistem *e-government* kepada Dinas Kominfo Manokwari maupun seluruh Dinas terkait. Penerapan *E-Government* di Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan Langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi birokrasi, transparansi pemerintahan, serta kualitas pelayanan publik. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, berbagai layanan pemerintahan dapat diakses dengan lebih cepat, mudah, dan aman oleh masyarakat. Agar implementasi *e-government* berjalan dengan optimal, diperlukan strategi yang komprehensif dan terarah.

Penerapan *E-Government* oleh Diskominfo melibatkan beberapa strategi yang tepat bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik. Salah satu strategi utama adalah Pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang berkualitas, meliputi koneksi internet yang andal serta sistem keamanan siber yang tangguh untuk menjaga data pemerintah dan masyarakat.

Komponen yang dapat di perhatikan oleh Pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan sistem *e-government* di Kabupaten Manokwari.

1. Pengembangan Infrastruktur Teknologi.

2. Pembangunan Jaringan Internet yang Merata.
3. Pembangunan Data, *Center*, dan *Server*, Pemerintah.
4. Penguatan Infrastruktur Komunikasi Internal.
5. Pengembangan Sistem dan Aplikasi Pemerintahan.
6. Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik.
7. Penerapan Sistem *E-Procurement*.
8. Kesiapan sumber daya manusia

Komponen tersebut sangat terpengaruh terhadap kinerja pemerintah secara khusus Dinas Kominfo Manokwari agar dapat menjadi perhatian untuk mengelolah sistem *e-government* untuk pengelolahan sistem

### 1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memberikan dasar penting dalam memahami tantangan dan strategi penerapan e-government. Penelitian berjudul “Strategi Penerapan E-Government di Kota Pekanbaru” oleh Desriani dan Paulina Nainggolan (2018) menunjukkan bahwa penerapan e-government di Kota Pekanbaru menghadapi berbagai kendala, antara lain minimnya anggaran, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi digital. Penelitian ini merekomendasikan penguatan SDM melalui pelatihan dan peningkatan anggaran serta pelibatan masyarakat dalam proses sosialisasi layanan digital.

Selanjutnya, Zainal A. Hasibuan (2007) dalam penelitiannya yang berjudul “Langkah-Langkah Strategis dan Taktis Pengembangan E-Government untuk Pemda” membahas metode penerapan dan pengembangan e-government, serta menyoroti pentingnya strategi pengolahan data kependudukan dan integrasi sistem nasional, termasuk perbandingan dengan negara-negara seperti Malaysia. Penelitian ini menjadi acuan dalam merancang kebijakan strategis di tingkat daerah.

Penelitian lain oleh Mochamad Ridwan Satya Nurhakim (2014) berjudul “Pengaruh Implementasi E-Government terhadap Perubahan Budaya Birokrasi untuk Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Sistem Pemerintahan Modern” menekankan bahwa e-government tidak hanya soal digitalisasi, tetapi juga proses perubahan budaya birokrasi. Ia menyimpulkan bahwa keberhasilan e-government sangat bergantung pada komitmen pimpinan, reorientasi birokrasi, dan keterlibatan masyarakat.

Pada tahun 2022, T. I. Nangameka melalui penelitiannya yang berjudul “Evaluation of E-Government Maturity through the Pillar Approach on the Official Website of the Situbondo Regency Government” melakukan evaluasi terhadap kematangan e-government di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Ia menemukan bahwa tingkat kematangan e-government sangat dipengaruhi oleh integrasi sistem informasi, kualitas layanan digital, serta kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia.

Di tingkat internasional, Ashaye dan Irani (2019) dalam penelitiannya berjudul “The Role of Stakeholders in the Effective Use of e-Government Resources in Public Services” menjelaskan bahwa keberhasilan e-government tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan aktif pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat sipil. Penelitian ini menegaskan pentingnya membangun kolaborasi yang kuat untuk mendukung efektivitas penggunaan sumber daya digital dalam pelayanan publik.

Kelima penelitian ini menjadi pijakan kuat dalam merancang dan mengevaluasi strategi penerapan e-government, khususnya dalam konteks lokal seperti Kabupaten Manokwari yang memiliki tantangan geografis dan sosial tersendiri.

## 1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menghadirkan kebaruan ilmiah dalam kajian penerapan e-government, khususnya pada konteks wilayah timur Indonesia, yaitu Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Berbeda dari sebagian besar penelitian sebelumnya yang lebih banyak dilakukan di daerah dengan tingkat infrastruktur yang relatif maju seperti Jawa atau Sumatera, penelitian ini mengangkat realitas penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di wilayah yang masih menghadapi tantangan geografis, sosial, dan teknologis yang kompleks.

Kebaruan lainnya terletak pada pendekatan kontekstual terhadap strategi implementasi e-government yang dianalisis secara menyeluruh melalui teknik analisis SWOT. Penelitian ini tidak hanya memetakan kekuatan dan kelemahan internal Diskominfo Kabupaten Manokwari, tetapi juga mempertimbangkan faktor eksternal seperti partisipasi masyarakat, kesenjangan digital antar wilayah, dan kapasitas SDM yang beragam. Pendekatan ini membedakan penelitian ini dari studi seperti Desriani & Nainggolan (2018) yang lebih terfokus pada aspek kebijakan dan penganggaran tanpa mempertimbangkan faktor geografis dan sosial secara spesifik.

Lebih jauh, penelitian ini juga memberikan kontribusi pada pengembangan model implementasi e-government berbasis kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat daerah, terutama dalam penguatan kapasitas distrik-distrik yang secara geografis terisolasi. Dalam hal ini, penelitian ini menjadi pelengkap dari temuan Nurhakim (2014) yang menekankan pentingnya transformasi budaya birokrasi sebagai bagian dari suksesnya e-government, namun belum menjangkau secara eksplisit konteks wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal).

Selain itu, penelitian ini memadukan data lapangan yang aktual dari tahun 2024 hingga 2025, yang memberikan gambaran faktual mengenai perkembangan terkini penerapan SPBE di tingkat kabupaten. Temuan ini memperkaya literatur akademik dengan memberikan bukti empiris mengenai dinamika penerapan e-government di daerah yang belum banyak diteliti secara mendalam, khususnya dalam kajian administrasi publik dan teknologi pemerintahan.

## 1.5 Tujuan.

Untuk mengetahui strategi penerapan *e-government* yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manokwari, dalam rangka meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik.

## II. METODE

Menurut Moh. Nazir (2011), penelitian mencakup semua tahapan yang diperlukan dalam merancang dan melaksanakan proses penelitian. Dalam pengertian yang lebih sempit, penelitian dapat diartikan sebagai proses mengumpulkan dan menganalisis data. Menurut Hamdi (2015). *Epistemologi* merupakan ilmu tentang pengetahuan, sedangkan metodologi, yang merupakan bagian dari *epistemologi*, dapat disebut sebagai ilmu tentang cara menemukan sesuatu. Berdasarkan pernyataan ini, metodologi dapat dipahami sebagai ilmu yang berhubungan dengan penemuan hal-hal baru.

Menurut Sugiyono (2011), analisis data terdiri dari tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data merupakan proses merangkum dan memilih informasi utama yang relevan, dengan memerlukan wawasan dan kecerdasan untuk mengidentifikasi tema, pola, serta menghilangkan informasi yang tidak dibutuhkan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan secara naratif melalui uraian singkat, bagan, atau bentuk lain yang serupa. Tahapan terakhir, yaitu penarikan kesimpulan, akan menghasilkan kesimpulan yang kredibel apabila didukung oleh bukti

yang valid dan analisis yang konsisten. Menurut Sahir, (2021) penelitian mencakup dua jenis metode utama: kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam terhadap persepsi atau fenomena tertentu, menghasilkan data deskriptif dalam bentuk narasi yang dijelaskan secara lisan dari subjek penelitian. Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan menurut Simangunsong, (2016) Secara umum metodologi di bagi menjadi tiga yaitu, penelitian kualitatif, kuantitatif dan gabungan. Penelitian kualitatif fokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial melalui data deskriptif seperti wawancara atau observasi.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Lokasi ini dipilih untuk mengkaji strategi Dinas Kominfo dalam penerapan *E- Government* di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Hasil**

Hasil analisis *SWOT* ini kemudian dituangkan dalam matriks *SWOT*, yang memetakan strategi-strategi seperti strategi SO (memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang), strategi WO (meminimalkan kelemahan dengan memanfaatkan peluang), strategi ST (mengggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman), dan strategi WT (meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman).

Bagian ini membahas temuan penelitian yang meliputi analisis dan interpretasi terhadap data yang diperoleh melalui wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Selain itu, penelitian juga mencakup infrastruktur serta media yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan *e-government* pada Dinas Komunikasi, Informatika, Kabupaten Manokwari. Data yang dianalisis berasal dari periode tahun 2024 hingga 2025, dan digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan penerapan *e- government* di Kabupaten Manokwari.

Strategi penerapan *E-Government* oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manokwari dirancang untuk menciptakan pemerintahan yang lebih modern, efisien, dan terbuka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi digital, pemerintah daerah berupaya meningkatkan kinerja administrasi, meminimalkan birokrasi yang berbelit, serta mempermudah akses layanan publik bagi seluruh warga Kabupaten Manokwari.

#### **3.2 Pembahasan**

Strategi penerapan *E-Government* oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manokwari dirancang untuk menciptakan pemerintahan yang lebih modern, efisien, dan terbuka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi digital, pemerintah daerah berupaya meningkatkan kinerja administrasi, meminimalkan birokrasi yang berbelit, serta mempermudah akses layanan publik bagi seluruh warga Kabupaten Manokwari. Penerapan *E-Government* atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Manokwari menjadi salah satu langkah strategis dalam upaya meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta transparansi pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, SPBE bertujuan untuk membangun sistem administrasi pemerintahan yang lebih modern, cepat, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Transformasi digital ini tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik, tetapi juga mendukung akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan berbagai program dan kebijakan.

Selain itu, penguatan kapasitas SDM dalam bidang teknologi informasi juga menjadi fokus utama. Diskominfo Kabupaten Manokwari secara aktif menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi bagi pegawai pemerintahan agar memiliki pemahaman yang baik mengenai sistem digital yang digunakan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penerapan SPBE tidak hanya bergantung pada teknologi yang canggih, tetapi juga sumber daya manusia yang kompeten dan mampu mengoperasikan sistem dengan baik.

### 3.3 Partisipasi dalam Perencanaan

Partisipasi dalam perencanaan *e-government* dalam sistem komunikasi dan informasi pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas, tentu adanya perencanaan sebagai tahap dalam proses kinerja sehingga sistem yang di kerjakan dapat berjalan maksimal sesuai dengan prosedur yang berlaku. Partisipasi yang dibutuhkan dalam tahap perencanaan adalah.

- Partisipasi dalam proses pemantauan dan penilaian operasional pemerintahan di daerah. Implementasi *e-government* melalui aplikasi ini berperan penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan daerah.
- Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Penerapan *E-Government* juga mendukung, Prinsip tata kelola yang baik mencakup tanggung jawab, keterbukaan informasi, dan keterlibatan masyarakat. Ketiganya menjadi pilar utama dalam menciptakan sistem yang adil, efektif, dan terpercaya dalam pengelolaan berbagai organisasi atau pemerintahan.
- Partisipasi pemerintah daerah dalam merencanakan pelayanan pemerintah melalui sistem yang dapat memudahkan pelayanan umum dan dapat berjalan secara transparan secara khusus di dinas Kominfo Kabupaten Manokwari.

Dalam perencanaan pemerintah daerah, tentu adanya rapat tahunan dalam kinerja daerah, atau (MUSREMBANG) sebagai alur dalam perencanaan sistem tersebut agar *E-Government* berjalan maksimal dan transparan kepada seluruh pelayanan di Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Manokwari. Selain melalui forum formal seperti Musrenbang, bentuk partisipasi lainnya dapat diwujudkan dalam kegiatan diskusi publik, forum konsultasi daring, serta penyusunan rencana strategis berbasis aspirasi masyarakat yang dikumpulkan melalui survei digital. Pendekatan ini membuka ruang yang lebih inklusif bagi warga untuk menyampaikan kebutuhan dan pandangannya dalam pengembangan sistem *e-government*. Partisipasi aktif seperti ini akan memperkuat relevansi sistem digital yang dibangun, karena selaras dengan kebutuhan nyata masyarakat.

Lebih lanjut, integrasi partisipasi dengan teknologi informasi akan mempercepat perencanaan yang responsif dan adaptif. Misalnya, penggunaan platform *e-Musrenbang* dapat memudahkan pengumpulan aspirasi masyarakat secara daring, sekaligus menciptakan jejak digital yang dapat ditelusuri sebagai bentuk akuntabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi dalam perencanaan bukan hanya memenuhi prinsip tata kelola yang baik, tetapi juga berperan strategis dalam menciptakan sistem pelayanan publik yang berkelanjutan dan berbasis data.

### 3.4 Partisipasi dalam Pelaksanaan

**Tabel. 3.1**  
**Prengkat distrik**

No	Organisasi Perangkat Daerah Distrik	Jumlah Pegawai	Jumlah Pegawai Berlatar belakang TIK (D3/S1/S2/S3)	Jumlah Pegawai dengan jenjang pendidikan S2 ke atas
1.	Distrik Manokwari Selatan			
2.	Distrik Manokwari barat			
3.	Distrik Manokwari Utara			
4.	Distrik Manokwari Timur			
5.	Distrik Masni			
6.	Distrik Warmare			
7.	Distrik Prafi			
8.	Distrik Sidey			
9.	Distrik Tanah Rubuh			

Data ini milik DISKOMINFO Manokwari

Pelaksanaan Program yang berjalan namun belum terintegrasikan dengan baik kepada seluruh wilayah di seluruh Kabupaten Manokwari sehingga penyesuaian data pada *E-Government* belum berlaku secara keseluruhan namun implemtasinya sudah berjalan di beberapa wilayah. Data di atas saya akan menjelaskan wilayah yang sudah dapat menggunakan sistem *E-Government* dengan baik dalam implementasi kinerja pemerintah. Distrik yang sudah di data oleh Dinas Kominfo dalam pelayanan *E-Government* yang baik yaitu, Distrik, Manokwari Barat, Manokwari Selatan, Manokwari Utara, Manokwari Timur Prafi yang mana secara wilayah mereka cukup dekat sehingga alur pelayanan sangat maksimal dan peningkatan SDM yang cukup memadai dan jaringan yang baik serta alat pendukung lainnya yang menunjang kinerja sistem *E-Government* yang lebih maksimal. Hal ini berbanding terbalik dengan Distrik Tanah rubuh, Warmare, Sidey dan Masni yang mana letak geografis yang tidak mendukung kinerja sisitem yang ada sehingga untuk mengaksesnya membutuhkan jangka waktu yang cukup lama serta SDM yang belum memadai menjadi faktor masalah bagi masyarakat dalam bekerja. Maka pemerintah harus mengambil Tindakan dalam menyelesaikan masalah yang menjadi faktor penghambat untuk pengoprasian *E-government* di seluruh Distrik.

Dinas di Kabupaten Manokwari juga menggunakan sistem *E-Government* dalam seluruh kinerja sesuai dengan urusan dan bidangnya masing masing dan wilayah perkantoran yang sangat strategis dapat mempermudah akses serta SDM yang baik di seluruh dinas dapat majadi pedoman yang baik untuk kinerja pemerintah daerah, dan akan mendapatkan hasil yang maksimal. Adapun permasalahan terhadap pertisipasi dinas dinas dalam menggunakan pemerintah berbasis *Government* yang menggunakan teknologi sebagai wadah

pelayanan kepada masyarakat. Hal yang menyebabkan keterhambatan Dinas dalam melakukan pelayanan dengan sistem *E-Government* adalah. 1, pengalihan kinerja dari pegawai yang lama ke yang baru atau pegawai yang usianya lebih tua dapat menyebabkan keterhambatan dalam mensinkronisasi kinerja pemerintah, SDM juga sebagai faktor utama dalam pengelolaan sistem *E-Government* di seluruh OPD badan dan kecamatan hingga desa juga terlibat dalam sistem ini agar terwujudnya sinkronisasi kebijakan di seluruh perangkat pemerintah Kabupaten Manokwari.

### 3.4 Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil

Penilaian responden terhadap partisipasi organisasi terkait penggunaan sistem *E-Government* di Kabupaten Manokwari, yang dijelaskan dalam tabel tersebut.

**Tabel 3.2**

Jawaban responden terhadap dampak/manfaat Sistem *E-Government*

Jawaban	Responden (orang)	Persen (%)
<b>BAIK</b>	28	56
<b>CUKUP</b>	17	34
<b>KURANG</b>	5	10
<b>Jumlah</b>	<b>50</b>	<b>100</b>

Sumber: Hasil pengolahan data riset 2023

**Tabel 3.3**

Jawaban	Responden (orang)	Persen (%)
<b>BAIK</b>	25	50
<b>CUKUP</b>	21	41
<b>KURANG</b>	4	8
<b>Jumlah</b>	<b>50</b>	<b>100</b>

Sumber: Hasil pengolahan data riset 2023

Tabel,5 dimana responden penggunaan *E-Government* di Tingkat kecamatan dan desa yang merasakan dampak dari penggunaan sistem tersebut untuk kinerja pemerintahan di tingkat kecamatan/distrik dan desa, sedangkan Tabel 6. Merujuk pada OPD atau Badan yang berada di jajaran pemerintah daerah, secara keseluruhan sangat baik dalam kalsifikasi peningkatan *E- government* di Kabupaten Manokwari namun tentu adanya evaluasi agar dapan menormalkan standar pelayanan yang sesuai dengan sistem yang berlalu dengan kondisi yang memadai serta mendukung untuk peningkatan kinerja pemerintah dalam birokrasi di seluruh perangkat pemerintah daerah.

Pihak- Pihak yang mendukung adalah ASN, Masyarakat yang terdampak Serta beberapa tenaga kerja honorer yang mana juga terlibat dalam pengoprasian sistem tersebut di setiap dinas dan perangkat pemerintahan lainnya.

### 3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap strategi penerapan e-government di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Manokwari, ditemukan bahwa implementasi e-government secara umum telah berjalan, namun masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan teknis. Salah satu temuan utama adalah bahwa infrastruktur teknologi yang tersedia, seperti jaringan internet dan perangkat keras, sudah cukup mendukung di wilayah-wilayah pusat, namun belum merata hingga ke distrik-distrik terpencil. Temuan ini selaras dengan penelitian Nainggolan & Aqil (2023) yang menunjukkan bahwa keberhasilan e-government sangat dipengaruhi oleh kualitas infrastruktur serta keterjangkauan teknologi oleh masyarakat.

Dari aspek kelembagaan, strategi yang diterapkan oleh Diskominfo Manokwari telah mencakup penyediaan pelatihan kepada pegawai, penguatan sistem keamanan data, dan pembentukan jaringan komunikasi internal. Hal ini sejalan dengan temuan dari Desriani & Nainggolan (2018) mengenai strategi di Kota Pekanbaru, yang menekankan pentingnya pelatihan SDM dan penguatan koordinasi antarlembaga untuk mengatasi kendala teknis dan meningkatkan efisiensi sistem.

Namun, berbeda dari penelitian oleh Hasibuan (2007) yang menyoroti pentingnya keterlibatan nasional dalam integrasi sistem, penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat keterbatasan integrasi antar-OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Manokwari, yang menyebabkan tidak semua sistem informasi saling terhubung. Ini menghambat kelancaran pengelolaan data dan pelayanan publik lintas instansi.

Dalam konteks partisipasi publik, responden menyatakan bahwa manfaat dari penggunaan sistem e-government sudah mulai dirasakan, terutama di wilayah-wilayah dengan jaringan dan SDM yang memadai, seperti Distrik Manokwari Barat dan Prafi. Namun, tingkat partisipasi masyarakat di distrik lain seperti Warmare dan Masni masih rendah akibat keterbatasan akses internet dan rendahnya literasi digital. Temuan ini menguatkan argumen Nurhakim (2014) bahwa keberhasilan e-government sangat tergantung pada dukungan sosial dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap teknologi.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa meskipun strategi yang digunakan telah mengarah pada penguatan transparansi dan efisiensi, masih diperlukan langkah-langkah komprehensif untuk menyelesaikan tantangan seperti: keterbatasan anggaran, kurangnya kebijakan teknis yang spesifik, dan belum optimalnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Seperti yang dikemukakan Gasparyan (2024), efektivitas perangkat tata kelola digital sangat bergantung pada kesiapan internal lembaga dan dukungan eksternal yang stabil.

Dengan demikian, dibandingkan dengan studi terdahulu, temuan dalam penelitian ini menegaskan pentingnya penyesuaian strategi penerapan e-government secara kontekstual, memperhatikan karakteristik geografis, sosial, dan kemampuan teknologi lokal di Kabupaten Manokwari. Penelitian ini berkontribusi memperkaya literatur dengan memberikan gambaran empiris mengenai pelaksanaan e-government di wilayah timur Indonesia yang masih menghadapi tantangan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat digital.

### 3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik atau (SPBE) di terapkan juga ditingkat kecamatan maupun desa yang mana platform atau website yang digunakan juga berbasis Elektronik hal ini menjadi salah satu langkah strategis dalam upaya meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta. transparansi pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, SPBE bertujuan untuk

membangun sistem administrasi pemerintahan yang lebih modern, cepat, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Transformasi digital ini tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik, tetapi juga mendukung akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan berbagai program dan kebijakan terdapat juga salah satunya program *E- Government* dapat berjalan dengan baik.

#### **IV. KESIMPULAN**

Diskominfo Kabupaten Manokwari telah menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung digitalisasi layanan pemerintahan. Dengan dukungan sumber daya yang memadai dan pendanaan dari APBD serta APBN, penerapan *e-government* semakin berkembang di daerah ini. Dan strategi yang tepat, seperti peningkatan infrastruktur TIK, penguatan kebijakan, serta edukasi dan pelatihan bagi aparatur dan masyarakat, penerapan *e-government* dapat berjalan lebih optimal serta memberikan manfaat nyata dalam pelayanan publik. Dalam implementasi kinerja untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Adapun wujud pelayanan dalam bentuk Ekternal dan Internal sehingga membutuhkan sinergi yang sama antara pegawai dan sistem *e- government* di DisKominFo agar optimalisasi kinerja dari sistem birokrasi pemerintahan, *e- government* terlaksana dengan maksimal kepada seluruh pelayanan untuk masyarakat kabupaten manokwari selatan

#### **Keterbatasan Penelitian.**

Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya fokus pada satu sistem pelayan *e-government* dan penggunaan pendekatan analisis SWOT yang belum maksimal kepada seluruh OPD di Kabupaten Manokwari.

#### **Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).**

Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan sistem *e-government* agar perkembangan kinerja sistem tersebut dapat diketahui peningkatannya dalam birokrasi pemerintahan di seluruh OPD, khususnya Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Manokwari.

#### **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kapala Dinas Komunikasi dan Informatika beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian. Dan juga dukungan dari dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian di Diskominfo Kabupaten Manokwari.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ashaye, O. R., & Irani, Z. (2019). The role of stakeholders in the effective use of e-Government resources in public services. *International Journal of Information Management*, 49, <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2019.05.016>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat. (n.d.). *Beranda*. <https://papuabarat.bps.go.id/id>
- Gasparyan, A. (2024). From paperwork to pixels: workload and digital governance in Armenian local authorities. *Frontiers in Political Science*, 6(March). <https://doi.org/10.3389/fpos.2024.1280109>
- Hamdi, A. S. (2015). *Metode penelitian kuantitatif aplikasi dalam pendidikan*. Deepublish.
- Hasibuan, Z. A. (2007). Langkah-langkah strategis dan taktis pengembangan e-government untuk Pemda. *Jurnal Sistem Informasi MTI UI*, 3(1), 6–70. <https://www.researchgate.net/publication/242130151>
- Ibadoghlu, G. (2018). Problems of Fiscal Equalization and Decentralization of Local Governments in Azerbaijan. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3109999>
- Nainggolan, D. P., & SD, Z. R. (2018). Strategi penerapan e-government di Kota Pekanbaru (Tesis, Universitas Riau). <https://media.neliti.com/media/publications/204939-strategi-penerapan-e-government-di-kota.pdf>
- Nainggolan, R. R. E., & Aqil, M. H. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Pengguna Aplikasi Pemerintah Kota Pagar Alam. *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan*, 5(2), 229–249. <https://doi.org/10.33701/jtkp.v5i2.38>
- Nangameka, T. I. (2022). Evaluation of E-Government Maturity through the Pillar Approach on the Official Website of the Situbondo Regency Government. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 14(1), 39–56. <https://doi.org/10.33701/jtp.v14i1.2520>
- Nazir, M. (2011). *Metode penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. [https://a-research.upi.edu/operator/upload/s\\_pkn\\_032713\\_chapter3.pdf](https://a-research.upi.edu/operator/upload/s_pkn_032713_chapter3.pdf)
- Nurhakim, M. R. S. (2014). Pengaruh implementasi e-government terhadap perubahan budaya birokrasi untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pemerintahan modern. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 11(3), 403–422. <https://doi.org/10.31113/jia.v11i3.59>
- Nurrahman, A., & Bagau, F. N. (2023). Analisis Kualitas Situs Web Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nabire dalam Penyediaan Informasi Publik. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 3(2), 137–154. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v3i2.3637>
- Nangameka & Kusmana, 2022) <https://ejournal.ipdn.ac.id/JMB/article/download/2845/1359>
- Sahir, S. H. (2021). Metodologi Penelitian. KBM INDONESIA.
- Simangunsong, F. (2016). *METODOLOGI PENELITIAN PEMERINTAHAN*. ALFABETA, CV.
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. <http://repository.iainpalopo.ac.id/4556/1/Subandi.pdf#nepage=37>
- Sunardi, D., Khuan, H., Muhari, M. D. A., Kalalo, R. R., Sabtohadhi, J., & Wibisono, O. N. (2023). Export of Crude Nickel (Government of Indonesia Vs European Union and Wto). *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(4), 1–11. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i4.678>